



**Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (OSS, JELITA, SIMBG, MPP)  
dan Perizinan Usaha DPMPTSP Jember**

***Utilization of Accounting Information Systems (OSS, JELITA, SIMBG, MPP)  
and Business Licensing of DPMPTSP Jember***

**Siti Wardatul Hasanah<sup>1\*</sup>, Fadillahtul Hasanah<sup>2</sup>, Asyiatul Rhodiyah<sup>3</sup>, Mutmainnah<sup>4</sup>**

<sup>1-3</sup>Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

Email: [sitiwardatul@gmail.com](mailto:sitiwardatul@gmail.com) <sup>1</sup> [fadilafalah719@gmail.com](mailto:fadilafalah719@gmail.com) <sup>2</sup> [icaasyia193@gmail.com](mailto:icaasyia193@gmail.com) <sup>3</sup>

Korespondensi penulis: [sitiwardatul@gmail.com](mailto:sitiwardatul@gmail.com)\*

**Article History:**

Received: Januari 16, 2025;

Revised: Februari 18, 2025;

Accepted: Maret 14, 2025;

Published: Maret 18, 2025

**Keywords:** Accounting Information System, Investment, Licensing, OSS, SIMBG

**Abstract:** *The development of technology in each country affects its government sector, especially in the field of public services, one of which is e-government. E-government as a practice of social innovation in public administration, can be done easily but sometimes still experiences difficulties or even failures. Trying to help improve the efficiency and effectiveness of licensing services by operating the OSS, JELITA, SIMBG, and MPP systems. In addition, providing licensing services and public service malls and analyzing comprehensive investment data from each period with PMA and PMDN categories to identify growth trends, sectors that have experienced significant increases, and key driving factors such as government policies, economic conditions and investment attractiveness. The methods used in this service are system operation and analysis. This work experience practice provides valuable experience for practitioners in understanding the mechanisms of government administration, regional investment management, and business licensing procedures. In addition to gaining practical experience, this activity also improves analytical skills, communication, and professionalism in the world of work. This agency has the utilization of information systems that support the development of community activities Implementation of OSS, Jelita, SIMBG, services and MPP at DPMPTSP Jember which are useful for providing positive impacts and providing effectiveness in business licensing and community services with this success need to be maintained and through increasing digital literacy, system maintenance, data integration, and ongoing socialization.*

**Abstrak**

Perkembangan teknologi di setiap negara mempengaruhi sektor pemerintahannya terutama dibidang pelayanan kepada masyarakat salah satunya *e-govement*. *E-govement* ebagai praktik inovasi social dalam administrasi public, dapat dilakukan dengan mudah namun terkadang masih mengalami kesulitan bahkan kegagalan. Berupaya membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perizinan dengan pengoperasian sistem OSS, JELITA, SIMBG, dan MPP. Selain itu juga, melakukan pelayanan perizinan dan *mall pelayanan public* serta menganalisa komperhensif data investasi dari sertiap periode dengan kategori PMA dan PMDN guna mengidentifikasi *tren* pertumbuhan, sektor yang mengalami peningkatan signifikan, serta faktor pendorong utama seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan daya Tarik investasi. Metode yang dilakukan dalam sebuah pengabdian ini yaitu pengoperasian sistem dan menganalisis. Praktik pengalaman kerja ini memberikan pengalaman berharga bagi praktikan dalam memahami mekanisme administrasi pemerintahan, pengelolaan investasi daerah, serta prosedur perizinan usaha. Selain memperoleh pengalaman praktis, kegiatan ini juga meningkatkan keterampilan analisis, komunikasi, dan profesionalisme dalam dunia kerja. Dinas pelayanan ini memiliki pemanfaatan sistem informasi yang mendukung perkembangan kegiatan usaha masyarakat

Implementasi OSS, Jelita, SIMBG, dan MPP di DPMPSTSP Jember yang berguna untuk memberikan dampak positif dan memberikan keefektifan dalam perizinan usaha dan pelayanan masyarakat dengan demikian keberhasilan ini perlu dijaga dan ditingkatkan melalui peningkatan literasi digital, pemeliharaan sistem, integrasi data, dan sosialisasi yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi Akuntansi, Penanaman Modal, Perizinan, OSS, SIMBG

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di setiap negara mempengaruhi sektor pemerintahannya terutama dibidang pelayanan kepada masyarakat salah satunya *e-govement* (Kim, 2021). *E-govement* adalah salah satu inovasi pelayanan public yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja-kinerja dari pemerintahan untuk berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat (Mardiana, 2021). Oleh karena itu, *e-govement* didefinisikan sebagai praktik inovasi social dalam administrasi public, dapat dilakukan dengan mudah namun terkadang masih mengalami kesulitan bahkan kegagalan.

Berdasarkan pasal 5 Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, salah satu bentuk layanan administratif yang diberikan kepada masyarakat adalah perizinan usaha. Namun, banyak massyarkat yang merasa bahwa proses perizinan yang dijalankan oleh aparat pemerintah masih kurang memuaskan, Proses teersebut sering kali dianggap rumit, lambat, berulang, tersebar serta tidak memiliki standar yang jelas. Selain itu pengawalan dalam proses perizinan massih minim ,dan sistemnya belum terintegrasi secara elektronik. Mengingat bahwa perizinan usaha sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam hal kepastian hukum dan legalitas usaha, pemerintah pusat kemudian mngembangkan sistem pelayanan perizinan di berbagai daerah di indonesia serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan usaha.

Penggunaan sistem informasi akuntansi yang didasarkan pada *Online Single Submission* (OSS), Jember Layanan Izin Terpadu (JELITA), Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), dan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember sangat penting dalam meningkatkan sebuah efektivitas juga efisiensi layanan perizinan bisnis. Dalam era digital saat ini dengan adanya sebuah tekhnologi informasi yang berkembang sangat baik, pemerintah daerah perlu menyesuaikan diri dengan perubahan ini untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. OSS sebagai platform perizinan yang terintegrasi memungkinkan pengajuan izin secara online, yang dapat memangkas waktu dan biaya yang sebelumnya ada dalam proses manual. Selain itu, aplikasi Jelita yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP berfungsi untuk sistem pemantauan dalam memperkuat layanan OSS dengan menyediakan fitur-fitur yang memudahkan dalam memantau dan mengelola data perizinan. Dengan cara ini, penggabungan

berbagai sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan perizinan, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi (<https://dpmptsp.jemberkab.go.id>, 2024).

SIMBG memainkan peran penting dalam pengelolaan izin bangunan, juga dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Dengan adanya SIMBG, proses pengurusan izin menjadi lebih terorganisir dan terbuka, memungkinkan pemohon untuk memantau status permohonan mereka secara langsung (Yuniar, 2020). Hal ini tidak hanya mempercepat proses izin, tetapi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam sebuah pelayanan publik. MPP sebagai pusat layanan terintegrasi juga memberikan kontribusi yang signifikan dengan menggabungkan berbagai tipe layanan perizinan di satu lokasi, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan yang diperlukan (<https://dpmptsp.jemberkab.go.id>, 2024). Dengan sistem yang terintegrasi ini, diharapkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jember dapat memberikan suatu pelayanan lebih baik terhadap semua masyarakat yang dapat mendorong suatu pertumbuhan investasi di daerah.

Pelaksanaan sistem informasi akuntansi berbasis OSS, Jelita, SIMBG, dan MPP diperkirakan dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Jember. Penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan teknologi informasi dalam layanan publik berkontribusi pada percepatan proses birokrasi serta pengurangan biaya operasional. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi yang optimal dapat meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas sistem informasi akuntansi dalam mendukung proses perizinan usaha dan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jember. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan lebih lanjut sistem informasi akuntansi di sektor pemerintahan. (Hendrawan, 2020)

Dalam konteks kebijakan pemerintah, penerapan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi digital sejalan dengan upaya untuk meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan investasi. Kebijakan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang baik bagi pelaku usaha. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal, diharapkan proses perizinan dapat lebih cepat dan efisien, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Maka dari hal itu sangatlah penting untuk melakukan suatu evaluasi pada penerapannya hal ini agar dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kemajuan teknologi. Penelitian ini akan memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana pemanfaatan sistem informasi akuntansi

berbasis OSS, Jelita, SIMBG, dan MPP dapat meningkatkan perizinan bisnis serta pelayanan masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jember. Dengan memahami dampak dari penerapan sistem ini, di harapkan mampu menentukan sebuah langkah yang strategis agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di masa yang akan datang (<https://dpmpstsp.jemberkab.go.id>, 2024).

## 2. METODE

Selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kegiatan pengabdian yang dilakukan mencakup beberapa aspek penting dalam mendukung layanan perizinan dan investasi. Pertama, mengoperasikan sistem OSS, JELITA, SIMBG, dan MPP guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan bisnis. Kedua, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan melakukan pengarahan terkait proses perizinan serta membantu pengurusan berkas yang berhubungan dengan Mal Pelayanan Publik (MPP). Ketiga, melakukan pemantauan dan analisis terhadap persentase peningkatan investasi pada setiap periode, baik dari kategori Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di wilayah Kabupaten Jember.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pelaksanaan kegiatan PPL di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jember, praktikan kami ditempatkan pada substansi Sekretariat (Program Administrasi), Penanaman Modal (Program Pengendalian), dan Perizinan (Program Pemberian Legalitas). Deskripsi pekerjaan dari substansi ini adalah meliputi administrasi, pemberian legalitas, perencanaan pengendalian, monitoring pelaksanaan investasi, evaluasi kinerja investasi, koordinasi dengan pihak terkait, penegakan kepatuhan dan pelaporan, pemantauan pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dan memastikan investasi berjalan sesuai rencana dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Jember. Tugas praktikan dalam substansi Sekretariat (Program Administrasi) membantu dalam urusan administrasi, program keuangan, aset, sumber daya manusia, urusan umum serta kegiatan kopri dalam lingkup dinas serta dengan melakukan sebuah tugas pelayanan pada *front office* yaitu belajar bagaimana melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang datang di kantor pelayanan DPMPSTSP Jember untuk melakukan sebuah pengurusan dokumen. Sedangkan untuk praktikan Penanaman Modal (Program Pengendalian) membantu dalam perencanaan proyek investasi di lapangan dan menganalisis data LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) untuk mengevaluasi kinerja investasi. Dan Untuk Perizinan (Program Pemberian Legalitas) Tugas utama dalam kegiatan ini adalah mendukung masyarakat serta pelaku usaha dalam memperoleh

kepastian hukum dalam menjalankan bisnis, meningkatkan iklim investasi, serta memastikan kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021.

Selama 40 hari kerja praktikan melakukan kegiatan PPL di DPMPTSP (DPMPTSP) Kabupaten Jember tepatnya pada bagian substansi Penanaman Modal (Program Pengendalian) mendapatkan tugas yang berhubungan dengan sebuah teori yang didapatkan saat perkuliahan khususnya dalam bidang akuntansi terkait Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Kegiatan praktikan yang dilakukan pada bagian substansi Sekretariat (Program Administrasi), Penanaman Modal (Program Pengendalian) dan Perizinan (Program Pemberian Legalitas) yakni meliputi :

### **Melakukan Rekap Surat Keluar pada Buku Agenda Tahunan**

Menyusun atau merangkum seluruh surat keluar yang telah dicatat dalam buku agenda selama satu tahun. Rekapitulasi ini mencakup informasi seperti Nomor dan tanggal surat keluar, Tujuan atau instansi penerima, Isi atau perihal surat, Status tindak lanjut surat. Rekap surat keluar ini biasanya dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan, atau tahunan) untuk memastikan keteraturan administrasi dan mendukung pelaporan.

Memudahkan Pemantauan dan Evaluasi, Menyediakan ringkasan data surat yang telah dikirim sepanjang tahun dan memastikan semua surat yang dikirim memiliki tindak lanjut yang jelas. Dengan melakukan rekap surat keluar, DPMPTSP dapat mengelola administrasi surat-menyurat dengan lebih sistematis, efisien, dan terorganisir, sehingga mendukung kelancaran operasional dan akuntabilitas dinas.

### **Melayani Pemohon pada Mall Pelayanan Publik (MPP)**

Melayani pemohon di Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan melakukan pengambilan antrian, mengarahkan tempat lokasi loket yang benar sesuai tujuan pengurusan dokumen para pemohon dan memberikan informasi yang baik, hal ini merupakan bagian penting dalam menciptakan pengalaman positif bagi pengunjung bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepuasan pengunjung, serta meningkatkan citra MPP sebagai lembaga pelayanan publik yang profesional dan ramah.

### **Pencarian Profil Pelaku Usaha Menggunakan Sistem OSS (*Online Single Submission*)**

Pencarian profil pelaku usaha melalui sebuah platform OSS (Online Single Submission) bertujuan untuk mempermudah akses informasi terkait identitas dan legalitas usaha berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi yang berfungsi menjadi Tanda Dfatr Perusahaan (TDP) , Angka Pengenal Importir (Api) juga dokumen lainnya. Sistem ini memungkinkan pengguna, termasuk pemerintah dan masyarakat untuk mencari data pelaku usaha secara efisien guna mendukung transparansi, akuntabilitas, dan

kemudahan dalam pengelolaan perizinan usaha. (Maulana, 2019) Dengan mengintegrasikan berbagai layanan perizinan dalam satu portal, OSS juga membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan administrative yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas bisnis mereka sesuai dengan klasifikasi bidang usaha masing – masing

### **Membuat Rincian Presentase Peningkatan Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Jember**

Rincian presentase peningkatan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memerlukan analisis komprehensif terhadap data investasi dari periode tertentu, dengan membandingkan angka realisasi investasi dari tahun ke tahun guna mengidentifikasi tren pertumbuhan, sektor yang mengalami peningkatan signifikan, serta faktor pendorong utama seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan daya Tarik investasi. Perhitungan dilakukan dengan rumus  $[(\text{Nilai Investasi Tahun } N - \text{Nilai Investasi Tahun } N-1) / \text{Nilai Investasi Tahun } N-1] \times 100\%$  untuk memperoleh persentase kenaikan atau penurunan investasi. (Tambunan, 2021) Untuk memastikan akurasi, data yang digunakan harus berasal dari laporan resmi dan dapat diverifikasi.

### **Melayani Pemohon dalam Pengambilan Berkas Perizinan**

Prosedur melayani pemohon dalam pengambilan berkas perizinan melibatkan beberapa tahapan yang terstruktur. Langkah awal pemohon biasanya memberikan berkas yang harus dipenuhi dengan syarat yang telah ditentukan kemudian diverifikasi oleh petugas untuk memastikan kelengkapan dan keabsahannya. (Sukoharjo) Jika berkas yang diserahkan lengkap, proses dilanjutkan ke tahap pengolahan, seperti pencetakan dan penandatanganan surat keputusan (SK) oleh pejabat berwenang. Setelah izin selesai diproses, pemohon diberitahu melalui pemberitahuan elektronik seperti *WhatsApp*. Setelah dihubungi, biasanya pemohon akan datang ke DPMPSTSP Jember dimana pemohon harus membawa surat tanda terima. Dengan membawa bukti tanda terima, pemohon akan diarahkan untuk menandatangani register pengambilan surat izin yang telah selesai. Pada era digital, DPMPSTSP Jember tidak menyidiakan pengambilan surat izin secara online dimana dapat di *download* pada sistem. Dengan tidak ketersediaan proses *online* ini, mampu memberikan efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada pemohon.

### **Memasukkan dan Merekap Data Perizinan**

Kegiatan memasukkan dan merekap data perizinan merupakan bagian penting dalam proses administrasi perizinan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi terkait permohonan izin dikelola dengan baik. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data dari pemohon, yang mencakup informasi pribadi, jenis izin yang dimohon, serta dokumen pendukung lainnya. Setelah data terkumpul, petugas akan memasukkan informasi tersebut ke

dalam sistem database perizinan. Selama proses ini, penting untuk memverifikasi keakuratan data yang dimasukkan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menghambat proses penerbitan izin. Penggunaan sistem digital dalam pengolahan data memudahkan pencarian dan pengelolaan informasi, serta meningkatkan efisiensi dalam penanganan permohonan izin.

Setelah data dimasukkan, langkah selanjutnya adalah merekap data tersebut untuk analisis dan pelaporan. Rekap ini dilakukan secara berkala untuk memantau jumlah permohonan izin yang diterima, diproses, dan disetujui. Data yang telah direkap juga digunakan untuk evaluasi kinerja pelayanan perizinan dan pengambilan keputusan strategis oleh instansi terkait. Selain itu, Ringkasan data ini memiliki peran krusial dalam menyusun laporan bagi pihak-pihak terkait, seperti otoritas daerah atau badan pengawas. Oleh karena itu, proses pencatatan dan pengolahan data perizinan tidak hanya berguna untuk keperluan administrasi internal, tetapi juga mendukung keterbukaan serta tanggung jawab kepada publik.

### **Menginput Data Pengajuan Perizinan di Sistem “JELITA DPMPTSP JEMBER”**

Kegiatan menginput data pengajuan perizinan di sistem "JELITA DPMPTSP JEMBER" merupakan langkah krusial dalam proses pelayanan perizinan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pemohon dapat mengakses sistem JELITA melalui website atau aplikasi mobile untuk mengisi formulir permohonan secara online, di mana mereka harus mengupload dokumen persyaratan yang diperlukan. Setelah data dan berkas diunggah, petugas DPMPTSP (DPMPTSP) akan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan. Proses ini tidak hanya mempermudah pemohon dalam mengajukan izin, tetapi juga memberikan suatu pengolahan data yang cepat dan lebih akurat hal ini membantu mempercepat waktu penerbitan izin. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan fitur pelacakan status permohonan yang dapat diakses oleh pemohon, memberikan transparansi dalam setiap tahap proses perizinan.

Setelah data pengajuan diinput, informasi tersebut akan direkap untuk keperluan analisis dan pelaporan. Data yang terkumpul akan digunakan untuk mengevaluasi jumlah permohonan yang diterima, diproses, dan disetujui, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Dengan menggunakan sistem JELITA, DPMPTSP JEMBER dapat mengelola informasi perizinan secara lebih terstruktur dan terintegrasi, Mendukung inisiatif pemerintah dalam membangun lingkungan investasi yang lebih menarik. Penerapan sistem ini selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik. (Pemerintah, 2021)

## **Menginput SKRD dari Cipta Karya ke Sistem SIMBG dan Mencetak Penerbitan Perizinan Pembangunan**

Kegiatan menginput SKRD (Surat Keputusan Retribusi Daerah) dari Cipta Karya ke dalam sistem SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, operator DPMPSTSP (DPMPSTSP) harus masuk ke dalam akun SIMBG dan menginput nomor SKRD serta jumlah retribusi yang harus dibayarkan. Setelah itu, berkas SKRD diunggah ke akun pemohon dalam sistem (No.16, 2002) Proses ini memastikan semua data telah tercatat dengan baik.

Setelah data SKRD diinput, langkah selanjutnya adalah mencetak penerbitan perizinan pembangunan. Penerbitan ini dilakukan setelah semua dokumen dan pembayaran retribusi diverifikasi. Operator Dinas Perizinan kemudian akan menyetujui penerbitan dokumen perizinan, yang biasanya berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dengan menggunakan sebuah aplikasi SIMBG, pemohon dapat memantau status permohonan mereka secara online, sehingga meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses perizinan.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa dinas pelayanan ini memiliki pemanfaatan sistem informasi yang mendukung perkembangan kegiatan usaha masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan hal itu dapat di buktikan dengan adanya beberapa faktor.

### **Peningkatan Efisiensi Perizinan Usaha**

Implementasi sistem OSS, JELITA, SIMBG, dan MPP telah berhasil mengintegrasikan berbagai proses perizinan yang sebelumnya terfragmentasi. Integrasi ini berkontribusi pada pengurangan duplikasi data, penyederhanaan alur perizinan, dan percepatan waktu proses perizinan. Selain itu, data yang terintegrasi memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap perkembangan perizinan usaha di Kabupaten Jember.

Sistem online berbasis OSS juga secara signifikan mengurangi birokrasi yang sebelumnya menjadi hambatan dalam proses perizinan. Permohonan izin kini dapat diajukan secara daring, mengurangi kebutuhan interaksi tatap muka dan pengumpulan dokumen fisik yang berulang. Hal ini turut mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi dan pungutan liar.

Dengan sistem yang terintegrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan pun meningkat. Pelaku usaha dapat memantau status permohonan izin secara real-time, sementara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) dapat



mengawasi kinerja serta progres perizinan secara menyeluruh. Kemudahan ini turut mendukung proses pengawasan dan evaluasi layanan publik secara lebih efisien.

Pemanfaatan sistem perizinan berbasis online juga memperluas akses bagi pelaku usaha, khususnya yang berada di wilayah terpencil. Kemudahan ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Jember.

### **Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat**

Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan publik, termasuk layanan perizinan usaha. Dengan lokasi yang strategis dan sistem layanan yang terintegrasi, masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan administrasi dengan lebih mudah dan cepat.

Efisiensi dan transparansi yang dihasilkan dari integrasi sistem perizinan juga berdampak pada meningkatnya kepuasan masyarakat. Pengurangan waktu tunggu, prosedur yang lebih sederhana, serta informasi yang mudah diakses memberikan pengalaman pelayanan yang lebih positif.

Sistem informasi akuntansi yang terintegrasi turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. DPMPTSP dapat memantau dan mengevaluasi kinerja layanan berdasarkan data yang akurat dan komprehensif. Identifikasi area yang perlu diperbaiki menjadi lebih mudah, sehingga kualitas layanan dapat terus ditingkatkan.

Sistem terintegrasi ini juga membuat DPMPTSP lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Umpan balik yang diterima dari masyarakat dapat dijadikan acuan untuk peningkatan layanan dan penyesuaian sistem sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengguna.

### **Tantangan dan Rekomendasi**

Meskipun sistem online telah diimplementasikan dengan baik, masih terdapat tantangan dalam hal literasi digital. Banyak pelaku usaha dan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami cara penggunaan sistem ini. Oleh karena itu, pelatihan dan sosialisasi secara rutin perlu dilakukan agar semua pihak dapat memanfaatkan sistem dengan maksimal.

Sistem informasi yang terintegrasi membutuhkan pemeliharaan dan pembaruan secara berkala guna memastikan performa yang optimal. Hal ini mencakup perbaikan sistem, peningkatan keamanan data, dan pelatihan bagi petugas layanan agar mereka tetap mampu mengoperasikan sistem secara profesional.

Selain itu, integrasi data antar sistem OSS, JELITA, SIMBG, dan MPP masih perlu ditingkatkan. Upaya ini membutuhkan koordinasi yang baik antar instansi terkait untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang digunakan dalam proses perizinan dan pelayanan.

Sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat serta cara penggunaan sistem perizinan online harus terus ditingkatkan. Edukasi yang tepat dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem, sehingga implementasi layanan digital dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih luas. Penerapan OSS, Jelita, SIMBG, dan MPP di DPMPSTSP Jember telah membawa perubahan positif yang substansial dalam mempercepat proses perizinan usaha serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Namun, keberhasilan ini perlu dijaga dan ditingkatkan melalui peningkatan literasi digital, pemeliharaan sistem, integrasi data, dan sosialisasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, DPMPSTSP Jember dapat terus meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini, yaitu:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya.
2. Orang tua yang senantiasa memberikan doa dukungan dan semangat.
3. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. CPEM, selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berusaha memberikan fasilitas terbaik kepada penyusun khususnya dan kepada seluruh mahasiswa/i pada umumnya.
4. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag, selaku Dekan FEBI UIN KHAS Jember.
5. Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I, selaku Ketua Jurusan FEBI UIN KHAS Jember.
6. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.
7. Mutmainnah S.E., M.E, selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang selalu memberikan pengarahan untuk kami, baik secara daring maupun luring.
8. Tita Fajar Ariyatiningih, S.H., M.M, selaku Kepala Dinas yang telah memfasilitasi kami untuk melaksanakan PPL.
9. Asih Dian Pratiwi, S.E, selaku Dosen Pamong yang selalu memberikan bimbingan dalam kelancaran dalam pelaksanaan PPL.
10. Seluruh staf pegawai Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Jember.

11. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan fisik maupun psikis, sejak mulai pelaksanaan praktik pengalaman lapangan hingga penyusunan laporan ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember. (n.d.). *Rapat koordinasi implementasi aplikasi JELITA (Jember Layanan Izin Terpadu)*. <https://dpmpstp.jemberkab.go.id/berita/vw-rapat-koordinasi-implementasi-aplikasi-jelita-jember-layanan-izin-terpadu>
- Gabriela, D. T. (2023). Efektivitas penerapan aturan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. *Lex Administratum*, 2.
- Hendrawan, D., Andersen, C., & Dewi, T. N. (2020). Study on Indonesia new online single submission policy on environmental permit on business in Indonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 339–349.
- Kim, C., & Kim, K. A. (2021). The institutional change from e-government toward smarter city; Comparative analysis between Royal Borough of Greenwich, UK, and Seongdong-gu, South Korea. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1), 1–33. <https://doi.org/10.3390/joitmc7010042>
- Mardiana, M. E., Adinda, R. A., & Isnaini, N. L. (2021). Analisis faktor keberhasilan implementasi e-government di Bandung, Batam, dan Surabaya. *Jurnal Social and Sains (SOSAINS)*, 1, 598–609.
- Maulana, H. (2019). *Sistem OSS versi 1.1: Penyempurnaan layanan perizinan berusaha*. Surakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 261 ayat (1).
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- Rahman, A., & Supriyadi, S. (2020). *Perencanaan anggaran daerah: Teori dan praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soeharto, I. (2012). *Manajemen proyek dari konseptual sampai operasional*. Jakarta: Erlangga.
- Tambunan, H. T. T. (2021). *Pembangunan ekonomi dan investasi di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuniar, S. (2020). Pengaruh sistem informasi manajemen bangunan gedung (SIMBG) terhadap kualitas pelayanan persetujuan bangunan gedung (PBG) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.